

## Lansia di era bonus demografi

### *Older person in the era of demographic dividend*

Lilis Heri Mis Cicih<sup>1\*</sup> dan Darojad N. Agung<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Lembaga Demografi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

<sup>2</sup> BKKBN Pusat

\*Korespondensi penulis: [lilisherimc@gmail.com](mailto:lilisherimc@gmail.com)

#### ABSTRACT

*Currently, the demographic dividend era is in progress, but improving the quality of competitive human resources is still a challenging process. Human capital investment needs to be implemented to make the older person healthier, independent, prosperous and dignified in the future to reach the second demographic dividend. This study provides an overview of the older person and province characteristics in the era of the demographic bonus. The data sources are the 2019 National Socio-Economic Survey (Susenas) and other official publications. The analysis was carried out descriptively on a provincial scale for individuals aged 60 years or over. The results showed a dependency ratio below 50 (namely demographic bonus), but several provinces still needed to decrease fertility and mortality. Based on the older person's current condition, most still have low access to income, education, health services, and communication technology. Various efforts need to be implemented in collaboration between the government and other stakeholders to enhance the better quality of the older person in the next future. It is necessary to provide people with job opportunities, knowledge, and health and financial security skills to prepare for old age.*

*Keyword: demographic bonus; dependency ratio; older person; active ageing; demographic component*

#### ABSTRAK

Saat ini, era bonus demografi sedang berlangsung, tetapi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing masih menjadi tantangan. Investasi modal manusia perlu dilakukan untuk menjadikan lanjut usia (lansia) sehat, mandiri, sejahtera, dan bermartabat di masa depan menyongsong bonus demografi kedua. Penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran karakteristik lanjut usia di era bonus demografi, dan capaian komponen demografi di setiap provinsi. Penelitian ini menggunakan sumber data mentah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019 dan berbagai publikasi resmi lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif dalam skala provinsi pada individu usia 60 tahun atau lebih (lanjut usia). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun sudah memasuki periode bonus demografi (rasio ketergantungan di bawah 50), beberapa provinsi masih perlu penanganan fertilitas, dan mortalitas. Melihat gambaran kondisi lanjut usia saat ini, masih banyak yang golongan rendah dalam hal pendidikan, pendapatan, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan teknologi komunikasi. Berbagai upaya perlu dilakukan oleh pemerintah dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mempersiapkan penduduk lanjut usia masa depan yang lebih berkualitas. Selain itu, pembekalan penduduk dengan pengetahuan dan keterampilan perlu dilakukan untuk persiapan masa tua. Penduduk diberikan kemudahan akses terhadap pendidikan tinggi, jaminan finansial, kesempatan kerja, dan kesehatan yang lebih baik.

Kata kunci: bonus demografi, rasio ketergantungan, lanjut usia, kelanjutusiaan aktif, komponen demografi



## PENDAHULUAN

Indonesia termasuk negara yang sedang mengalami penuaan penduduk, dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk usia 60 tahun atau lebih (lanjut usia). Proporsi lanjut usia meningkat dua kali lipat pada kurun waktu 1971-2019, dari 4,5% menjadi 9,6%. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019, sebanyak 25,6 juta lanjut usia, terdiri dari 52,4% perempuan dan 47,6% laki-laki (BPS, 2019). Diproyeksikan penduduk lanjut usia akan mencapai 63,3 juta (19,8%) pada tahun 2045 (BPS, 2018).

Kondisi tersebut menjadi tantangan pembangunan dalam peningkatan kualitas manusia. Penduduk yang berkualitas diharapkan tidak hanya panjang umur, melainkan juga hidup dalam kondisi sehat, sehingga dapat menjadi modal pembangunan. Angka harapan hidup (*Life Expectancy* atau LE) penduduk meningkat dari tahun 2015 – 2045, dari 72,5 tahun menjadi 73,5 tahun (BPS, 2018). Namun gap antara angka harapan hidup dengan angka harapan hidup sehat (*Healthy Life Expectancy* atau HALE) masih sekitar 8,8 tahun. Berdasarkan hasil perhitungan Kementerian Kesehatan tahun 2017, bahwa LE sekitar 71,5 tahun, dan HALE sekitar 62,7 tahun. Artinya bahwa penduduk hanya menjalani hidup sehat sekitar 62-63 tahun dari 71-72 tahun kehidupan yang diperkirakan akan dijalani.

Kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan juga masih memerlukan perhatian, karena masih tergolong rendah. Bahkan untuk penduduk lanjut usia, rata-rata lama sekolahnya hanya sekitar 5 tahun atau tidak tamat Sekolah Dasar (SD) (BPS, 2019). Kondisi seperti itu memerlukan perhatian serius, terutama jika dikaitkan dengan upaya mencapai bonus demografi. Menurut pengertian, bonus demografi (pertama) sebagai suatu keadaan yang ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia kerja (15-64 tahun) dibandingkan dengan usia tidak bekerja (0-14 dan 65+ tahun) (Hayes & Setyonaluri, 2017; Mason dkk., 2016). Keadaan ini terjadi karena perubahan dalam struktur penduduk suatu negara sebagai akibat transisi dari kelahiran dan kematian tinggi menjadi rendah (Gribble & Bremmer, 2013).

Keuntungan demografis yang dapat diperoleh mengacu pada percepatan pertumbuhan ekonomi (Gribble & Bremmer, 2013). Namun bonus demografi tidak otomatis mendorong pertumbuhan ekonomi (Crespo Cuaresma dkk., 2014), perlu peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Selain itu, penduduk usia kerja memiliki produktivitas yang tinggi (Mason dkk., 2017) yang dapat terserap di pasar kerja, tabungan rumah tangga, dan meningkatnya porsi perempuan dalam pasar kerja (Lee & Mason 2006). Untuk itu, diperlukan analisis kebijakan terperinci untuk menunjukkan manfaat bonus demografi tidak hanya secara teori, tetapi juga dalam penerapan rencana pembangunan. Perlu dilihat peran berbagai sektor, dan daerah dalam meraih bonus demografi (Hayes & Setyonaluri, 2017).

Hasil perhitungan proyeksi penduduk tahun 2045 (BPS, 2018) menunjukkan bahwa bonus demografi atau dividen demografi pertama di Indonesia mencapai puncaknya sekitar tahun 2020 ketika rasio tersebut berada pada titik terendah. Rasio tanggungan sekitar 45 (terdiri dari 34 usia 0-14 tahun, dan 11 usia 65 tahun atau lebih) per 100 orang usia 15-64. Ini berarti setiap tanggungan didukung oleh 2,2 orang usia kerja.

Bonus demografi pertama menghasilkan bonus sementara, dan yang kedua mengubah bonus itu menjadi aset yang lebih besar dan pembangunan berkelanjutan. Hasil ini tidak otomatis, tetapi tergantung pada implementasi kebijakan yang efektif, termasuk meningkatkan produktivitas sebagai kunci pertumbuhan di masa depan (Woetzel dkk., 2014). Eksploitasi yang terampil dari dividen kedua, khususnya di saat kelas konsumen Indonesia sudah berkembang pesat (Hayes, 2014), berpotensi melakukan perubahan besar-besaran pada tabungan keluarga, dan investasi.

Hubungan antara investasi modal manusia dengan perubahan demografi selama transisi demografis, dapat dilihat hasil perhitungan National Transfer Accounts (NTA) (Mason dkk., 2016). Salah satu yang disoroti dari hasil tersebut yaitu implikasi sosial, politik, dan ekonomi dari penuaan penduduk.

Isu penuaan penduduk merupakan hal penting terkait bonus demografi (Barsukov, 2019). Penuaan penduduk merupakan tantangan pembangunan yang perlu ditangani dengan pendekatan semua kelompok umur dan sepanjang kehidupan (*life cycle*). Upaya untuk menghadapi tantangan tersebut dengan pembangunan sosio-ekonomi yang berkelanjutan dan memastikan kualitas hidup yang layak bagi para lanjut usia (Dobrokhleb & Barsukov, 2017). Persiapan tidak hanya menyangkut manusianya, melainkan juga dari segi kebijakan, program, dan dukungan regulasi atau peraturan perundang-undangan.

Berbagai pembahasan terkait bonus demografi, namun masih sedikit penelitian yang melihat hubungannya dengan lanjut usia, khususnya di Indonesia. Sesuai dengan Wongboonsin & Wongboonsin (2005), untuk mencapai bonus demografi antara lain perlu melihat kondisi demografis, dan sumber daya manusia yang ada. Sehubungan dengan itu, dalam penelitian ini melihat gambaran capaian bonus demografi dari parameter demografi di berbagai provinsi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran karakteristik lanjut usia saat periode bonus demografi pertama. Penelitian ini tidak membahas mengenai pertumbuhan ekonomi sebagai dampak dalam kaitannya dengan bonus demografi.

## METODOLOGI

Desain penelitian ini adalah *cross-sectional*, dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data utama yang digunakan adalah Susenas tahun 2019 dan hasil proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2015-2045. Untuk memberikan gambaran terkait capaian kependudukan di era bonus demografi, disajikan gambaran komponen demografi pada tingkat provinsi, dan karakteristik individu. Unit analisis terdiri dari provinsi, dan individu lanjut usia (berusia 60 tahun atau lebih). Jumlah lanjut usia dari data Kor Susenas 2019 sebanyak 1.204.466 orang.

Data kuantitatif diolah menggunakan aplikasi *Statistical Product and Service Solutions*

(*SPSS*). Pada tulisan ini, hasil analisis data disajikan secara deskriptif dalam bentuk tabel dan gambar. Untuk mengetahui hubungan antar variabel, dilakukan analisis korelasi antara Rasio Ketergantungan (RK) atau *Dependency Ratio* dengan komponen demografi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dibagi menjadi dua yaitu pada tingkat provinsi dan tingkat individu. Pada tingkat nasional dan provinsi dibahas capaian komponen demografi utama, serta proporsi lanjut usianya. Selanjutnya pada tingkat individu melihat berbagai aspek yang perlu diperbaiki, sehingga dapat terwujud lanjut usia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat.

### *Gambaran Komponen Demografi di Tingkat Nasional dan Provinsi*

Pada tingkat nasional dan provinsi disajikan capaian komponen demografi saat periode bonus demografi, mencakup tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Selain itu juga disajikan proporsi lanjut usia untuk memberikan gambaran capaian penuaan penduduk, jika persentasenya sudah mencapai 10% atau lebih.

Pada saat ini, rasio ketergantungan di hampir semua provinsi mencapai angka di bawah atau sama dengan 50. Artinya, 100 penduduk usia kerja menanggung 50 penduduk bukan usia kerja. Kondisi ini dapat dikatakan sudah masuk periode bonus demografi. Hanya tiga provinsi yang mempunyai rasio ketergantungan di atas 50, yaitu Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Rasio Ketergantungan nasional mulai mendekati 50 pada tahun 2010, menurun terus dan mencapai terendah pada tahun 2020 (45,5). Periode ini tidak akan berlangsung lama karena angka kelahiran yang menurun terus dapat berdampak pada jumlah penduduk usia kerja. Di sisi lain, meningkatnya angka harapan hidup berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya kembali rasio ketergantungan, dan perlu diantisipasi supaya lanjut usia tidak menjadi beban penduduk lainnya.

Seperti tampak pada Gambar 1, rasio ketergantungan tua meningkat terus dan sejak tahun 2030 angkanya cenderung stagnan. Sementara itu, rasio ketergantungan muda menurun terus seiring dengan penurunan fertilitas.

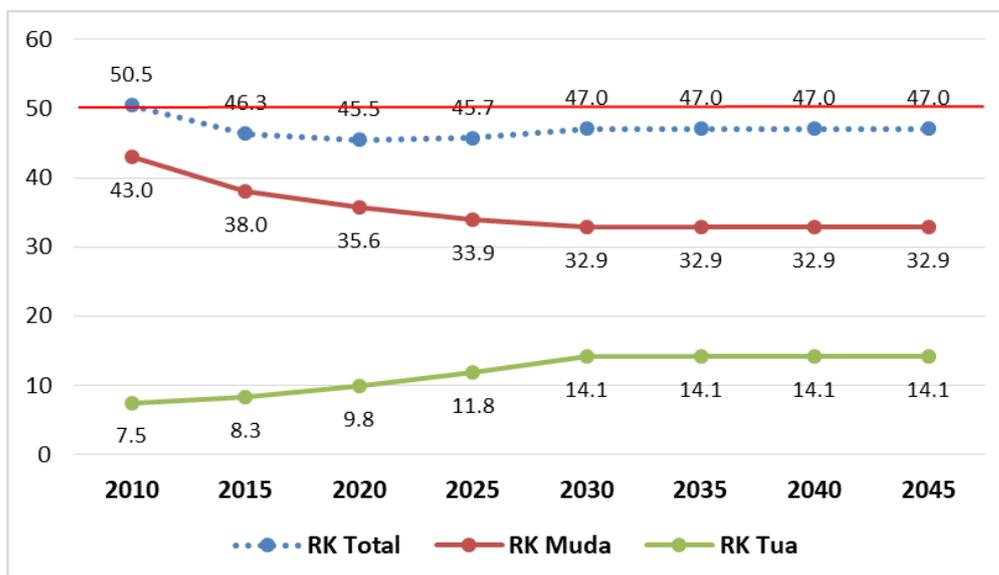
Bonus demografi dapat benar-benar bermanfaat jika diiringi dengan kualitas sumber daya manusia yang baik. Penduduk usia kerja yang sehat, berpendidikan, dan produktif, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Meskipun upaya penurunan kelahiran dan kematian cukup bagus, dan mencapai target yang ditentukan, perlu upaya untuk mempersiapkan sektor lainnya terkait dengan persiapan kualitas penduduk, sehingga memiliki pengetahuan, keterampilan, dan berdaya saing tinggi. Pemberian pemahaman mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai bonus demografi juga penting untuk diberikan, sehingga ada persiapan yang dilakukan sejak dini. Pemahaman mengenai kehidupan masa tua

bukan semata milik lanjut usia, melainkan untuk semua kelompok umur. Persiapan keuangan perlu dipersiapkan ketika memasuki usia kerja, dengan berupaya menabung untuk hari tua.

Menurut Crespo Cuaresma dkk. (2014), adanya tabungan merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai bonus demografi. Secara agregat melalui tabungan dapat meningkatkan "prospek investasi dan pertumbuhan" suatu negara. Oleh karena itu, perlu didorong dengan kebijakan untuk menggalakkan tabungan nasional.

Jaminan yang ada saat ini seperti kesehatan dan ketenagakerjaan perlu ditingkatkan kembali kualitas layanannya. Khusus untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tidak hanya sektor formal saja, melainkan mencakup sektor informal juga. Karena sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal, termasuk juga lanjut usia yang bekerja. Untuk BPJS Kesehatan, ke depan juga sudah mempertimbangkan pembiayaan untuk pelayanan PJP, sehingga dapat diantisipasi jika terdapat kebutuhan di masa depan.



**Gambar 1 Tren Rasio Ketergantungan Indonesia, 2010-2045**

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, dan 2015-2045 (Badan Pusat Statistik 2013)

Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 (Badan Pusat Statistik 2018)

Catatan: RK = Rasio Ketergantungan

Idealnya, Indonesia sudah dapat menikmati bonus demografi. Namun sepertinya masih menjadi tantangan dalam hal kualitas sumber daya manusia, termasuk penduduk usia kerja dengan berbagai permasalahannya. Dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), sebesar 69,2%, artinya 69,2 persen penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Selain itu, masih 5% tingkat pengangguran terbuka (TPT), artinya sekitar 5% jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (BPS, 2020).

Jika dilihat per provinsi, rasio ketergantungan tertinggi di Provinsi NTT, ternyata juga memiliki *Total Fertility Rate* (TFR) paling tinggi. Rasio ketergantungan mempunyai korelasi yang cukup besar yaitu 78,3% dengan tingkat signifikansi 0,01. Terkait dengan TFR, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 menetapkan sasaran TFR sebesar 2,26 pada tahun 2020 menjadi 2,1 pada 2024 (BKKBN, 2020). Target ini akan tercapai dengan adanya komitmen berbagai pihak termasuk pemerintah daerah. Selain NTT, beberapa provinsi di bagian timur seperti Sulawesi Barat, Papua, dan Maluku masih mempunyai TFR di atas angka nasional.

Dari sisi Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate* - IMR), NTT juga masih mempunyai IMR tinggi, dan termasuk kategori *intermediate rock* ( $30 \leq \text{IMR} \leq 70$ ). Angkanya masih sekitar 32,3, yang berarti bahwa terdapat 32 atau 33 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup. Pada tingkat nasional, IMR tahun 2020 sebesar 19,6 dan termasuk kategori *hard rock* ( $\text{IMR} < 30$ ). Dari angka tersebut terdapat 19 atau 20 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup.

Berbeda dengan fertilitas, korelasi antara rasio ketergantungan dengan IMR lebih rendah, yaitu 36,8 persen, dengan tingkat signifikansi 0,05. Jika korelasi TFR atau IMR dengan rasio kecenderungan menunjukkan tanda positif, artinya semakin tinggi fertilitas atau mortalitas, maka rasio kecenderungan juga tinggi. Sebaliknya jika TFR atau IMR rendah, maka rasio kecenderungan juga rendah.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta – yang memiliki rasio kecenderungan rendah – juga memiliki TFR dan IMR paling rendah. Sementara itu, Angka Harapan Hidup (AHH) provinsi ini tinggi dan rasio kecenderungannya rendah. Sesuai dengan hasil korelasi antara rasio kecenderungan dengan angka harapan hidup yang mempunyai tanda negatif. Nilai korelasi Pearson sekitar 41,8% dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05.

Korelasi negatif juga ditunjukkan antara proporsi lanjut usia dengan rasio ketergantungan. Contohnya, DI Yogyakarta telah mencapai penuaan penduduk lebih dulu dan persentasenya tertinggi dan rasio keter-gantungannya cukup rendah. Begitu juga dengan angka harapan hidup dan migrasi neto mempunyai hubungan negatif. Dalam hal migrasi, DI Yogyakarta migrasi netonya positif dengan nilai kedua tertinggi artinya banyak penduduk masuk ke provinsi tersebut. Seperti diketahui bahwa provinsi ini merupakan daerah yang diminati banyak orang untuk tinggal di sana. Dari angka *Age Specific Net Migration Rate* (ASNMR) ternyata mereka yang masuk ke provinsi tersebut paling banyak berusia 20-24 tahun. Hal ini dapat terkait dengan banyaknya mahasiswa yang menuntut ilmu di berbagai perguruan tinggi, karena biaya hidup relatif murah.

Provinsi dengan rasio ketergantungan paling rendah pada tahun 2020 yaitu DKI Jakarta, yaitu 38,7. Capaian TFR dan IMR cukup rendah, sedangkan untuk angka harapan hidup merupakan paling tinggi, juga di atas angka nasional. Hanya migrasi neto DKI Jakarta menunjukkan -5,2 – paling tinggi dibanding provinsi lainnya – artinya banyak penduduk meninggalkan provinsi ini. Provinsi ini juga unik, jumlah penduduk siang dan malam berbeda, karena banyak penduduk komuter (ulang alik) dari daerah sekitarnya. Dari proporsi penduduk lanjut usia, DKI Jakarta juga sedang mengalami penuaan penduduk, meski pada tahun 2020 belum mencapai 10%.

Satu provinsi dengan TFR dan IMR yang masih tinggi adalah Papua Barat, dengan rasio ketergantungan mencapai 46,2. Persentase penduduk lanjut usianya masih tergolong paling

rendah dibanding provinsi lainnya. Meskipun TFR masih cukup tinggi, tapi ada pendapat bahwa penduduk tidak bersedia membatasi kelahiran. Mereka menganggap bahwa lahan masih cukup luas, dan kepadatan penduduknya masih rendah. Migrasi neto positif dengan angka kedua tertinggi, yaitu sekitar 9,2. Artinya banyak penduduk yang masuk ke provinsi tersebut. Dilihat dari ASNMR, baik penduduk perempuan maupun laki-laki paling banyak masuk ke provinsi tersebut berusia 25-29 tahun. Dapat dikatakan bahwa penduduk ini termasuk kelompok usia kerja. Meskipun demikian, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap perlu dikembangkan, apalagi di provinsi tersebut banyak potensi alam.

Dari tahapan transisi demografi (Adioetomo, 2019), DKI Jakarta termasuk tahap transisi demografi lanjut (dengan RK <40-44,9 per 100 penduduk usia kerja). DI Yogyakarta juga termasuk tahap transisi demografi lanjut. Suatu capaian yang cukup bagus dilihat juga dari komponen fertilitas, mortalitas, dan harapan hidup dibanding provinsi lainnya. Hal yang perlu diperhatikan adalah kualitas sumber daya manusia terutama lanjut usianya, karena jumlahnya semakin banyak untuk menjadi modal bukan beban. Berbeda dengan NTT, masih termasuk tahap pra-transisi demografi (rasio ketergantungan 50-54,9 per 100 penduduk usia kerja).

Secara keseluruhan, dilihat dari parameter demografi seperti pada Tabel 1, provinsi-provinsi dapat dikelompokkan menurut tahap transisi demografi sebagai berikut:

1. Transisi demografi lanjut (rasio ketergantungan <40-44,9 per 100 penduduk usia kerja), mempunyai kisaran: TFR 1,82 sampai 2,53 anak per wanita; IMR 11,4 sampai 46 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup; angka harapan hidup 65,5 sampai 75,4 tahun; dan migrasi neto -0,07 sampai 9,22. Provinsi yang sudah masuk tahap ini sebanyak 14 provinsi, yaitu Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Banten, Papua, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Gorontalo, dan Jawa Timur.

2. Transisi sedang berjalan (rasio ketergantungan 45-49,9 per 100 penduduk usia kerja), mempunyai kisaran: TFR 1,82 sampai 2,26 anak per wanita; IMR 11,7 sampai 21,0 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup; angka harapan hidup 72,0 sampai 75,6 tahun; dan migrasi neto -5,23 sampai 0,88. Provinsi yang sudah masuk tahap ini sebanyak 17 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Maluku, Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), Riau, Maluku Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Lampung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat.

3. Tahap pra-transisi demografi (rasio ketergantungan 50-54,9 per 100 penduduk usia kerja). Provinsi yang berada pada tahap ini masih sebanyak tiga, yaitu NTB, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Barat. Dibanding angka nasional, provinsi-provinsi tersebut mempunyai TFR dan IMR yang lebih tinggi (kecuali Sumatera Barat), angka harapan hidup lebih rendah (kecuali Sumatera Barat), dan migrasi keluar yang lebih kecil (kecuali Sulawesi Tenggara).

Seiring dengan era bonus demografi saat ini, seyogyanya setiap provinsi dapat bercermin dari kondisi saat ini. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi suatu keharusan jika akan meraih bonus demografi kedua di masa depan. Berbagai upaya untuk mempersiapkan lanjut usia di masa depan sudah perlu dilakukan sejak saat ini, yang didukung adanya regulasi.

Sampai saat ini sedang dilakukan proses penyusunan Undang-undang Kesejahteraan Lanjut Usia atau Rancangan Undang-undang (RUU) yang baru untuk menggantikan undang-undang yang lama. Sebelumnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dianggap sudah kurang sesuai dengan perkembangan kelanjutusiaan dan perubahan paradigma. Dari segi usia juga sudah cukup tua, yaitu selama 22 tahun. Dalam proses penyusunan dan masuk menjadi prioritas badan legislatif (baleg) memerlukan perjuangan yang gigih, karena masih kalah dengan isu lainnya.

Sebagai peraturan perundang-undangnya, sudah dirumuskan juga Strategi Nasional (Stranas) Kelanjutusiaan, atas inisiasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Naskah ini sudah selesai pada tahun 2019. Semula diharapkan dapat ditanda tangani oleh presiden pada saat peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) tahun 2019 di Bandung. Namun sampai saat ini masih tertunda, dan belum ada informasi lebih lanjut terkait pengesahannya. Dari kedua hal tersebut, dapat dikatakan bahwa isu kelanjutusiaan masih belum menjadi prioritas dari segi peraturan perundang-undangan dibanding isu lainnya.

Perhatian yang kurang terhadap isu kelanjutusiaan juga dapat dilihat pada berbagai provinsi. Regulasi terkait kelanjutusiaan ini selayaknya tidak hanya dibuat di tingkat nasional, melainkan juga di tingkat daerah. Ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas dalam implementasi program dan kegiatan kelanjutusiaan di daerah, dan sebagai perwujudan komitmen daerah. Sayangnya belum semua daerah mempunyai peraturan perundangan terkait kelanjutusiaan. Selain itu, peraturan daerah yang sudah ada perlu diperbaharui kembali jika undang-undang yang baru sudah disahkan. Umumnya peraturan daerah yang sudah dibuat mengacu pada peraturan perundangan yang lama yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

#### *Karakteristik Individu Lanjut usia di Era Bonus Demografi*

Karakteristik sosial, ekonomi, demografi, kesehatan dan akses terhadap teknologi komunikasi lanjut usia disajikan pada Tabel 2, bersumber pada data Susenas 2019. Jumlah lanjut usia tahun 2019 diperkirakan sekitar 25,6 juta orang, dengan distribusi paling banyak adalah: laki-laki daripada perempuan, kelompok muda (60-69 tahun), tinggal bersama tiga generasi, dan berstatus kawin. Secara jumlah, lanjut usia banyak yang tinggal di daerah perdesaan, namun jika berdasarkan distribusinya, maka yang banyak terdapat di perkotaan.

Terkait dengan lanjut usia yang tinggal bersama baik dengan pasangan atau keluarga atau tiga generasi perlu menjaga keharmonisan apalagi masa pandemi Covid-19. Hubungan yang harmonis ini penting untuk mencegah terjadinya kekerasan, penelantaran, pelecehan, dan diskriminasi terhadap lanjut usia. Umumnya kejadian tersebut dilakukan oleh anggota keluarga atau orang terdekatnya. Menjaga lanjut usia merasa aman dan nyaman tinggal di rumahnya sendiri sangat membantu mempertahankan kondisi kesehatannya.

Secara keseluruhan lanjut usia banyak berstatus kawin, namun umumnya lebih banyak pada lanjut usia laki-laki. Lanjut usia perempuan lebih banyak yang berstatus janda. Perlu perhatian jika lanjut usia perempuan berstatus janda tersebut, tinggal sendiri, dan status sosial ekonominya rendah.

Tingkat pendidikan lanjut usia seperti gambaran tingkat pendidikan pada umumnya penduduk Indonesia. Sebagian besar lanjut usia berpendidikan rendah (79,5% kurang dan atau sampai tamat SD). Begitu juga dengan tingkat ekonomi (dihitung dari pengeluaran rumah tangga per kapita) tergolong masih rendah (paling banyak pada 40% terbawah). Dapat dikatakan bahwa lanjut usia Indonesia dengan pendidikan rendah sudah keburu tua sebelum mereka kaya atau mempunyai jaminan keuangan. Kondisi ini juga dapat dilihat dari kepemilikan tabungan, bahwa sebagian besar lanjut usia tidak memiliki rekening tabungan, dan juga pensiun. Sedangkan sumber pembiayaan terbesar berasal dari anggota rumah tangga yang bekerja, sedikit dari pensiun, bahkan untuk investasi (deposito, royalti, saham, bunga bank dan sejenisnya) kurang dari satu persen.

Karena kondisi kemiskinan, dan kurangnya jaminan keuangan pada masa tua, maka lanjut usia masih banyak yang bekerja dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian penulis pada tahun 2020 bahwa sebagian besar lanjut usia bekerja dengan memenuhi kebutuhan dasar hidup. Kondisi ini menunjukkan bahwa lanjut usia Indonesia masih tergolong miskin. Seharusnya lanjut usia tidak dituntut atau terpaksa untuk bekerja, melainkan

aktivitas yang mereka lakukan semata untuk mengisi waktu luang. Bekerja buat lanjut usia semata untuk tetap berpartisipasi dalam kegiatan sesuai keinginannya sendiri dan untuk aktualisasi diri. Hak lanjut usia untuk masih tetap berpartisipasi seperti ini perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Sebagai upaya untuk mengantisipasi lanjut usia masih bekerja dengan keadaan terpaksa, penduduk usia kerja diberikan kesempatan kerja, dan diedukasi untuk menabung. Ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai bonus demografi di masa depan. Dengan adanya kepemilikan tabungan ini, diharapkan dapat memberikan perlindungan finansial bagi mereka saat lanjut usia.

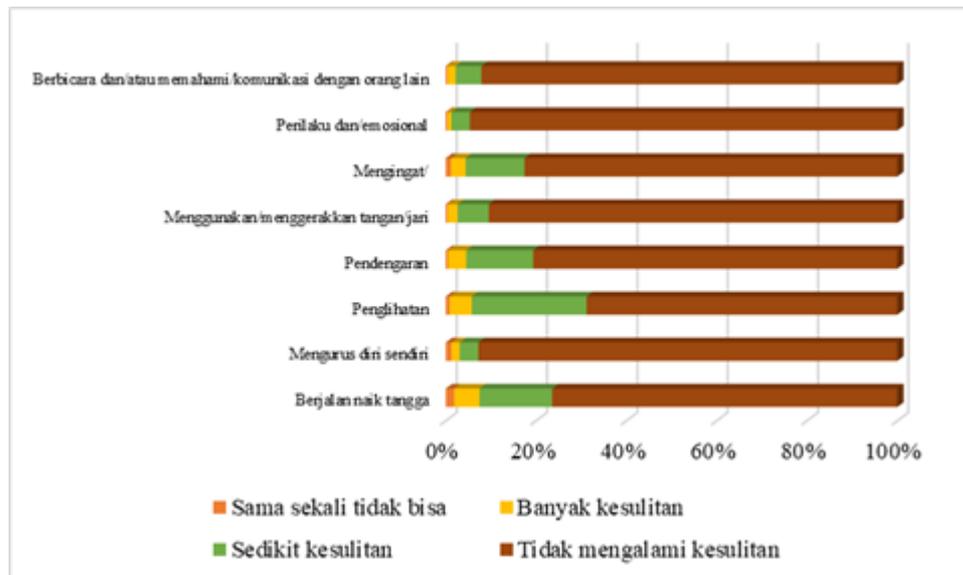
Bisa jadi lanjut usia yang bekerja karena memang mereka sehat, dalam arti tidak mengalami keluhan kesehatan sampai terganggunya aktivitas sehari-hari. Status kesehatan lanjut usia juga dilihat dari gangguan fungsional, yang dijabarkan dalam delapan macam gangguan berdasarkan *Washington Group on Disability Statistics* (Washington Group, 2017). Ini dikembangkan oleh United Nations Washington Group on Disability Statistics, untuk membuat pertanyaan-pertanyaan terkait disabilitas. Gangguan/keterbatasan fungsional merupakan suatu indikator penting bagi kesehatan dan kesejahteraan lanjut usia (Pavela, 2015).

Dari hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa sebagian besar lanjut usia tidak mengalami gangguan fungsional. Lansia yang tidak mengalami gangguan penglihatan, dan gangguan berjalan naik tangga persentasenya

lebih rendah dari gangguan lainnya. Umumnya lanjut usia masih bisa mengurus diri sendiri, tidak mengalami gangguan seperti: perilaku/emosional, menggunakan/ menggerakkan tangan dan jari, dan berbicara dan/atau memahami/komunikasi dengan orang lain. Dari kategori yang tidak bisa sama sekali, paling banyak persentasenya pada gangguan berjalan/naik tangga.

Lanjut usia yang sama sekali tidak bisa mengurus diri sendiri perlu mendapat perhatian, apalagi jika memerlukan Perawatan Jangka Panjang (PJP) atau *Long Term Care* (LTC). Hal ini tidak saja berhubungan dengan penyediaan pendamping atau care giver atau perawat geriatrik, juga berdampak pada kebutuhan pembiayaan.

Saat ini sedang dikembangkan program PJP oleh Bappenas dengan melibatkan berbagai sektor terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan BKKBN. Program ini dikembangkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat atau komunitas yang peduli lanjut usia, dan diintegrasikan dengan sistem kelanjutusiaan yang dinamakan SILANI. Sistem Informasi Lanjut Usia (SILANI) ini merupakan layanan berbasis online dengan menyajikan kategori lanjut usia dan posisi tempat tinggal dalam peta. Melalui sistem ini juga sedang diupayakan adanya suatu data terpadu, sehingga terdapat layanan satu data lanjut usia. Data by name by address ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk penentuan sasaran program, sehingga dapat lebih tepat sasaran. Pada tahap awal baru dilakukan uji coba di tiga provinsi yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali.



**Gambar 2 Gangguan Fungsional Lanjut Usia Indonesia, 2019**

Sumber: Hasil pengolahan data Susenas 2019

Gambaran lanjut usia juga dilihat dari kepemilikan rumah, dan hampir semua lanjut usia mempunyai rumah sendiri. Namun untuk akses terhadap teknologi komunikasi masih memerlukan perhatian, apalagi masa pandemi Covid-19 ini. Adanya pembatasan sosial, dan jaga jarak, sehingga mengurangi interaksi antara satu dengan yang lain, maka akses teknologi komunikasi sangat penting. Dari hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa akses lanjut usia terhadap telepon seluler lebih tinggi dibanding terhadap internet. Hal ini dapat terkait dengan literasi dari lanjut usia yang belum tinggi, sehingga tidak menggunakan internet. Sedangkan telepon dapat digunakan lanjut usia sebagai sarana komunikasi, tanpa harus menggunakan internet.

Ke depan jika ingin meraih bonus demografi kedua, diharapkan ada upaya yang serius dalam meningkatkan tingkat dan kualitas pendidikan penduduk. Karena akses pendidikan saat ini sudah lebih mudah dibanding ketika jaman lanjut usia sekarang berada pada usia sekolah.

Pada tahapan pencapaian bonus demografi kedua, peran lanjut usia sangat besar. Hal ini disebabkan, rasio ketergantungan yang kembali meningkat setelah mengalami penurunan, lebih banyak disumbang oleh jumlah lanjut usia yang

semakin meningkat. Walaupun terjadi peningkatan jumlah penduduk di usia yang tidak produktif lagi, namun bonus demografi atau *demographic dividend* tetap dapat diupayakan. Tentunya dengan persyaratan bahwa lanjut usia tetap mandiri, sehingga dapat memberikan insentif dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi.

Gambaran tentang ketenagakerjaan lanjut usia penting untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam menyusun kebijakan pembangunan termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut hasil pengolahan data Susenas 2019, hampir sebagian lanjut usia masih bekerja. Umumnya lanjut usia bekerja di lapangan usaha pertanian, jasa, dan industri (BPS, 2019). Namun sebagian besar lanjut usia bekerja di sektor informal, hanya sedikit yang bekerja di sektor formal. Sebagian besar (80,76%) berusaha sendiri, baik tanpa dibantu buruh maupun dibantu buruh tak dibayar. Dari segi jam kerja, lanjut usia banyak yang bekerja penuh atau lebih dari 35 jam per minggu. Meskipun demikian, banyak lanjut usia yang mempunyai penghasilan atau upah rendah atau bahkan termasuk pekerja tidak dibayar. Kondisi seperti ini memerlukan perhatian pemerintah untuk membuat kebijakan atau aturan terkait ketenagakerjaan lanjut usia

**Tabel 1. Parameter Demografi Menurut Provinsi dan Nasional, 2020**

NO	PROVINSI	RK	TFR	IMR	AHH	Net migrasi	%Pop 60+
1	Nusa Tenggara Timur	54,7	2,77	32,3	68,8	-0,7	9,1
2	Sumatera Barat	51,4	2,41	16,3	73,0	-0,96	9,5
3	Sulawesi Tenggara	50,7	2,42	23,2	71,4	0,19	8,0
4	Sumatera Utara	49,9	2,4	16,9	73,4	-2,93	8,8
5	Maluku	49,9	2,44	30,3	69,4	-2,45	8,4
6	Sulawesi Barat	49,7	2,53	33,3	68,7	0,4	7,9
7	Aceh	49,6	2,35	19,4	72,5	-0,8	8,0
8	Nusa Tenggara Barat	49,2	2,37	30	69,4	1,92	9,3
9	Riau	48,8	2,36	15,8	73,8	1,95	6,5
10	Maluku Utara	48,3	2,38	28,8	69,9	0,17	7,8
11	Sumatera Selatan	47,9	2,3	15,6	73,8	-1,79	8,9
12	Kalimantan Selatan	47,9	2,26	21	72,0	0,88	10,0
13	Sulawesi Tengah	47,5	2,43	31,9	69,0	1,13	9,0
14	Papua Barat	46,2	2,47	46	65,5	9,22	5,9
15	Jawa Tengah	46,1	1,95	13,4	74,6	-1,68	13,9
16	Lampung	45,8	2,21	16,4	73,6	-2,02	10,0
17	Kalimantan Utara	45,8	2,33	17,3	73,4	5,01	8,2
18	Sulawesi Selatan	45,8	2,06	18,3	72,9	-1,89	11,1
19	Sulawesi Utara	45,7	2,03	18,8	72,8	-0,99	12,6
20	Kalimantan Barat	45,7	2,2	18,1	72,9	-0,75	8,8
21	Jambi	45	2,21	19,7	72,5	-0,81	9,6
22	Bengkulu	44,6	2,21	24	71,1	0,44	9,5
23	Jawa Barat	44,6	2,05	15,8	73,8	0,32	10,0
24	Kep. Bangka Belitung	44,4	2,21	17,4	73,2	0,93	9,3
25	Gorontalo	44,1	2,12	33,1	68,7	-1,24	9,6
26	DI Yogyakarta	43,9	1,82	11,4	75,4	6,6	15,0
27	Banten	43,7	2,14	14,3	74,3	1,28	8,3
28	Papua	43,7	2,39	37,2	67,7	-0,07	6,0
29	Jawa Timur	43,2	1,82	15,2	74,0	-1,37	14,2
30	Kepulauan Riau	42,3	2,17	13,4	74,7	13,67	6,2
31	Bali	42,3	1,89	14,6	74,1	3,93	12,1
32	Kalimantan Tengah	41,8	2,0	18,3	72,9	1,33	7,8
33	Kalimantan Timur	41,1	2,07	16,9	73,4	0,26	8,3
34	DKI Jakarta	38,7	1,87	11,7	75,6	-5,23	8,9
<b>INDONESIA</b>		45,5	2,16	19,6	73,4	-0,5	10,7

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 (Bappenas, 2018)

**Tabel 2. Jumlah dan Persentase Lanjut usia Menurut Karakteristik Sosial, Ekonomi, Demografi, Kesehatan, dan Akses Teknologi Informasi, Indonesia, 2019**

Variabel	Kategori	n	
		25,6 juta	(%)
<i>Living Arrangement</i>	Sendiri	2.438.800	9,38
	Berdua Pasangan	5.207.800	20,03
	Bersama Keluarga	7.098.000	27,3
	Bersama 3 generasi	10.561.200	<b>40,62</b>
	Lainnya	691.600	2,66
Kelompok Umur	60-69 tahun	16.368.309	<b>63,82</b>
	70-79 tahun	7.101.002	27,68
	80 tahun ke atas	2.179.975	8,5
Jenis Kelamin	Laki-laki	13.426.243	<b>52,35</b>
	Perempuan	12.223.042	47,65
Daerah Tempat Tinggal	Perdesaan	12.107.428	47,20
	Perkotaan	13.541.857	<b>52,80</b>
Tingkat Pendidikan	Tamat SD/kurang	20.662.200	<b>79,47</b>
	Tamat SMP/SMA	4.105.400	15,79
	Tamat Perguruan Tinggi	1.180.400	4,54
Status Perkawinan	Kawin	15.789.800	<b>60,73</b>
	Cerai mati/hidup	9.937.200	38,22
Tingkat Ekonomi	Belum kawin	273.000	1,05
	40% terbawah	11.398.400	<b>43,84</b>
	40% menengah	9.685.000	37,25
Status Kepemilikan rumah	20% teratas	4.916.600	18,91
	Milik sendiri	23.807.667	<b>92,82</b>
Penggunaan telepon seluler	Bukan milik sendiri	1.841.619	7,18
	Ya	11.050.796	<b>43,08</b>
Penggunaan internet	Tidak	14.598.489	56,92
	Ya	2.037.177	7,94
Kegiatan selama seminggu terakhir	Tidak	23.612.108	<b>92,06</b>
	Bekerja	12.841.400	<b>49,39</b>
	Pengangguran	85.800	0,33
Kepemilikan rekening tabungan	Mengurus RT	8.491.600	32,66
	Lainnya	4.581.200	17,62
Sumber terbesar pembiayaan RT	Ya	5.991.621	23,36
	Tidak	19.657.664	<b>76,64</b>
	ART yang bekerja	20.407.039	<b>79,56</b>
Keluhan kesehatan sampai terganggunya aktivitas sehari-hari	Kiriman uang/barang	3.422.076	13,34
	Investasi (Deposito, dsb)	17.697	0,69
	Pensiunan	1.643.200	6,41
	Ya	6.719.140	26,2
	Tidak	18.930.145	<b>73,8</b>

Sumber: Diolah dari data Susenas 2019 Catatan: ART=Anggota Rumah Tangga

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa rasio ketergantungan nasional sudah di bawah 50 setelah tahun 2010, dan mencapai titik terendah tahun 2020. Selanjutnya mulai meningkat lagi setelah tahun 2020 seiring dengan peningkatan jumlah lanjut usia. Pada tingkat provinsi, sebagian besar sudah mempunyai angka rasio ketergantungan di bawah 50, kecuali NTT, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tengah. Dari angka fertilitas, dan mortalitas ada beberapa provinsi yang masih memerlukan penanganan, yang masih menjadi tantangan dalam bidang kependudukan.

Sebagai upaya menyongsong bonus demografi kedua, maka gambaran karakteristik lanjut usia saat ini dapat dijadikan bahan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Karakteristik individu lanjut usia saat ini masih termasuk rendah dalam hal pendidikan, penghasilan, akses terhadap teknologi informasi, kesehatan, dan kepemilikan tabungan.

Meskipun capaian rasio ketergantungan sudah cukup rendah, namun tidak secara otomatis dapat meraih bonus demografi. Terkait dengan hasil penelitian, dapat disajikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah dengan dukungan para pemangku kepentingan lain perlu memperbaiki kualitas penduduk calon lanjut usia dari segi pendidikan (pendidikan), ekonomi (penghasilan, kepemilikan tabungan), akses ke teknologi informasi, dan kesehatan untuk mempersiapkan masa lanjut usia.
- b. Pemerintah perlu mendorong terciptanya kesempatan kerja bagi penduduk usia kerja, dan menjamin terserapnya mereka di berbagai sektor. Upaya ini didorong juga dengan peningkatan program kemampuan kerja dan keterampilan penduduk usia kerja, dan kemampuan bahasa asing, sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja asing.
- c. Pemerintah perlu meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga.

- d. Perlu studi lanjutan yang lebih rinci di setiap provinsi terkait lanjut usia dan capaian bonus demografi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini merupakan hasil kerjasama kemitraan BKKBN dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan (PUSDU) BKKBN Pusat yang telah memberikan bantuan dana penelitian. Dukungan yang diberikan sangat bermanfaat bagi penulis untuk melakukan penelitian, diseminasi dalam webinar internasional, dan juga publikasi ilmiah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, S. M. (2019). *Keragaman demografi (Analisis pola transisi demografi kabupaten/kota dalam kerangka pencapaian dan pemanfaatan bonus demografi)*.
- BPS. (2013). *Proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2018). *Proyeksi penduduk Indonesia 2015-2045*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2019). *Statistik penduduk lanjut usia di Indonesia 2019*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2020). *Keadaan angkatan kerja di Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- Barsukov, V.N. (2019). From the demographic dividend to population ageing: World trends in the systemwide transition. *Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast*, 12(4), 167–182. <https://doi.org/10.15838/esc.2019.4.64.11>
- BKKBN. (2020). *Rencana Strategis BKKBN 2020-2024*. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Crespo Cuaresma, J., Lutz, W., & Sanderson, W. (2014). Is the demographic dividend an education dividend? *Demography*, 51(1), 299–315. <https://doi.org/10.1007/s13524-013-0245-x>

- Dobrokhleb, V. G., & Barsukov, V. N. (2017). Demographic theories and the regional aspect of population ageing. *Ekonomicheskie i Sotsialnye Peremeny*, 54, 89–103. <https://doi.org/10.15838/esc/2017.6.54.6>
- Gribble, J. N., & Bremmer, J. (2013). Achieving a demographic dividend. *Population Bulletin*, 67(2), 1–15. <https://www.prb.org/resources/achieving-a-demographic-dividend/>
- Hayes, A. (2014). The mixed blessing of Asia's growing middle class. *East Asia Forum Quarterly*, 6(4), 23–26.
- Hayes, A., & Setyonaluri, D. (2017). *Taking advantage of the demographic dividend in Indonesia: A brief introduction to theory and practice* [Policy Memo]. UNFPA. <https://indonesia.unfpa.org/en/publications/taking-advantage-demographic-dividend-indonesia-brief-introduction-theory-and-practice>
- Lee, R. D., & Mason, A. (2006). What is the demographic dividend? *Finance and Development*, 43(3), 16–17.
- Mason, A., Lee, R., & Jiang, J. X. (2016). Demographic dividends, human capital, and saving. *The Journal of the Economics of Ageing*, 7, 106–122. <https://doi.org/10.1016/j.jeoa.2016.02.004>
- Pavela, G. (2015). Functional status and social contact among older adults. *Research on Aging*, 37(8), 815–836. <https://doi.org/10.1177/0164027514566091>
- Washington Group. (2017). *Overview of disability measurement*. Washington Group
- Woetzel, J., Tonby, O., Thompson, F., Burtt, P., & Lee, G. (2014, November). *Southeast Asia at the crossroads: Three paths to prosperity*. McKinsey Global Institute.
- Wongboonsin, K., & Wongboonsin, P. (2005). *Second demographic dividend*.

